

ANALISIS HUKUM TERHADAP ZAKAT EMAS YANG DI GADAIKAN

(Study Kasus di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari

Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

NUR AINNY

NPM. 1421030055

Program Studi: Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440H/2018M

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ZAKAT EMAS YANG DI GADAIKAN
(Study Kasus di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits yang wajib dijalankan oleh semua umat Islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat, akan tetapi nasabah PT.Pegadaian khususnya di cabang Arif Rahman Hakim Antasari, beberapa dari mereka masih ada yang belum mengetahui adanya kewajiban zakat atas harta yang dimiliki melebihi nishab dan haul, yang mereka ketahui selama ini hanyalah kewajiban zakat fitrah saja. Adapun mereka yang sudah mengetahui adanya kewajiban zakat mal namun belum pernah membayarkan zakatnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah wajib mengeluarkan zakat pada emas yang di gadaikan? Dari permasalahan ini penulis bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kenapa nasabah belum pernah membayarkan zakat emas yang mencapai nishab dan haul dan juga untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap zakat emas yang di gadaikan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan di Pegadaian Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung, yang sumber datanya diperoleh dari nasabah yang belum pernah membayarkan zakat emas yang sedang di gadaikan dan pegawai pegadaian yang mengetahui data-data dari nasabah tersebut. Penelitian ini termasuk deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan dengan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam Hukum Islam telah jelas bahwa adanya kewajiban membayar zakat dari macam-macam zakat itu sendiri. Zakat terhadap barang gadai sendiri, termasuk dalam zakat piutang yang tetap adanya kewajiban zakat setelah barang yang di gadaikan tersebut berada ditangan kembali. Tidak ada kewajiban zakat atas emas yang sedang di gadaikan karena kepemilikan emas tersebut tidak dalam kepemilikan penuh, dan jika akan membayar zakat nya peminjam atau nasabah dapat menunggu hingga barang gadai tersebut sudah dalam kembali menjadi hak milik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : **NUR AINNY**

NPM : **1421030055**

Jurusan : **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP ZAKAT EMAS
YANG DI GADAIKAN (Study Kasus di Pegadaian
Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Haryanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002

Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : **NUR AINNY**

NPM : **1421030055**

Jurusan : **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP ZAKAT EMAS
YANG DI GADAIKAN (Study Kasus di Pegadaian
Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Haryanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002

Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹ (Q.S AT-TAUBAH: 103)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.203.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan pada orang-orang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya :

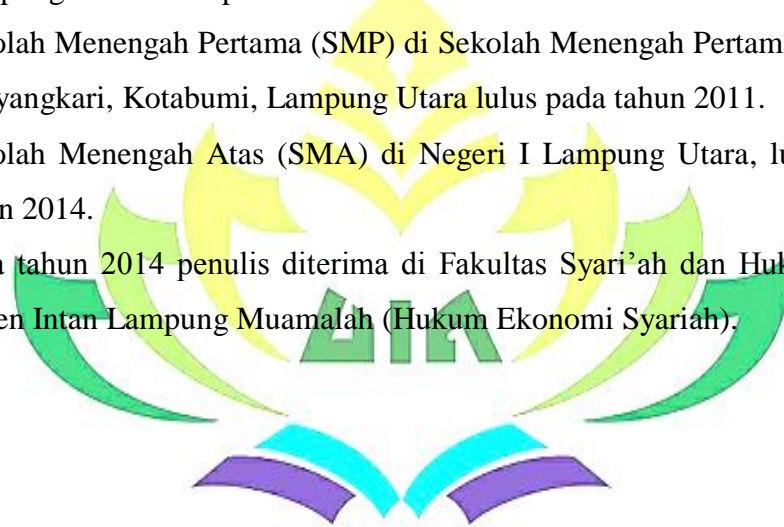
1. Kedua orangtuaku, Bapak Ahmad Sriyanto dan Ibu Sukarti yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan membesarkanku dengan doa disetiap langkah, serta selalu mengajarkan aku dari kecil yang benar-benar polos hingga dewasa saat ini untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Untuk Ayuk pertamaku Alm. Titi Haryani, Kakak pertamaku Agus Wahyudi, S.T., Kakak keduaku Hariyanto, S.E., ayuk iparku Samruni Rohimi, S.Kep., Bripka.Yenni kardiana S.H., dan Keluarga besarku yang telah banyak membantu materil maupun moril serta masukan hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapainya cita-cita.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nur Ainny. Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 21 Juni 1996, anak keempat dari empat bersaudara, diantaranya Titi Hariyani, Agus Wahyudi, dan Hari Yanto, putra dari pasangan bapak Ahmad SriYanto, dan Ibu Sukarti.

Jenjang pendidikan penulis yaitu :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Muslimin, Kotabumi, Lampung Utara.
2. Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri II, Desa Kampungbaru, Lampung Utara lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari, Kotabumi, Lampung Utara lulus pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Negeri I Lampung Utara, lulus pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai syarat salah satu memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas semua bantuan pihak, rasa hormat terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada mahasiswa.
3. Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar

yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku ketua jurusan Muamalah bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku sekretaris jurusan, dan bapak Muslim, M.H.I., selaku staf jurusan yang telah membantu dalam melakukan bantuan dan nasihat-nasihat yang telah diberikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;
7. Seluruh guru-guru SDN 1 Kotabumi Tengah, SMP Kemala Bhayangkari, dan SMAN 1 Kotabumi yang telah mendidik dan mengajarkanku ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
9. Pegadaian Arif rahman Hakim Antasari dan Para Nasabah yang telah membantu dan memperbolehkan penelitian sehingga terdapatnya informasi yang dibutuhkan.
10. Untuk Alba Roma Triwijaya, S.H., dan Diah Saraswati terimakasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat serta motivasi serta guna menyelesaikan karya tulis ini.
11. Untuk sahabat-sahabatku Dira Uznul Azizah S.A.N., Selvi Yana Putri S.Kom., Opphy Astagia S.Kom., Trisna Wati, Sherly Putri Maulia, dan

Feni Yanti yang selalu membantu, memberikan masukan, motivasi dan juga semangat yang tiada henti.

12. Untuk keluarga besar Muamalah A angkatan tahun 2014 yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.
13. Untuk teman-teman seperjuangan Brudul yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.
14. Untuk teman-teman KKN kelompok 80 yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.
15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis

Nur Ainny

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat	12
B. Macam-macam Zakat	14
C. Dasar Hukum Zakat	19
D. Syarat dan Rukun Zakat	23
E. Harta Benda Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	26
F. Mustahik Zakat	41
BAB III LAPORAN PENELITIAN	

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung.....	44
B. Produk dan Layanan.....	57
C. Mekanisme Gadai Perhiasan Emas	66

BAB IV ANALISA DATA

Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang di Gadaikan.....	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan memahami judul skripsi penelitian ini yaitu **“Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas Yang Di Gadaikan (Studi kasus Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)”**. Maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²
2. Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah.³
3. Zakat Emas adalah zakat mal (harta) penghasilan yang memiliki perhitungannya sendiri sebesar 20 dinar (85 gram) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mencapai nishab dan haul.⁴
4. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang meminjam uang dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 68.

³ Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.44.

⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), h.9.

terdiri atas perhiasan atau barang rumahtangga. Hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur.⁵

Berdasarkan penjelasan judul di atas penulis dapat merumuskan judul skripsi yaitu analisis hukum terhadap zakat emas yang di gadaikan yang difokuskan pada kasus yang terjadi di Pegadaian Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dipilihnya judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Zakat Emas yang di Gadaikan”, antara lain:

1. Alasan Objektif

Zakat mal diperoleh dari umat Islam yang memiliki harta simpanan/tabungan berjumlah satu nishab atau lebih yang telah tersimpan satu tahun atau haul. Seseorang yang menyimpan harta berupa emas di pegadaian syariah rata-rata dipergunakan untuk investasi dalam memutar usahanya. Sedangkan yang terjadi di pegadaian syariah mereka hanya menggadaikan harta berupa emas dengan tidak memperhatikan pengeluaran zakat yang akan dibayarkannya. Dengan alasan emas yang sudah digadaikan tidak lagi harus dibayarkan zakatnya, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat mal. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengeluaran zakat emas yang di gadaikan.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.284.

2. Alasan subjektif

- a. Terdapat buku-buku atau literature yang tersedia sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan zakat.
- b. Judul skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang membahas dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis.
- c. Dan pembahasan skripsi sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis, yaitu jurusan Mu'amalah fakultas Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban yang bersifat ibadah yang merupakan rukun Islam yang semua muslim wajib mengeluarkannya. Kekayaan yang dikeluarkan, dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya yang telah Allah sediakan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya⁶. Oleh karna itu ada tiga pihak yang berhak atasnya yaitu : pekerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan masyarakat yang mewakili manusia.⁷

Dasar Hukum atas wajibnya zakat telah disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁸

⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jeddah: Intermedia, 2013), h.256.

⁷*Ibid*, h.257.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004).

Berdasarkan ayat diatas zakat sendiri sudah tidak asing lagi bagi seorang muslim, karena kewajibannya sama seperti orang yang melaksanakan solat. Seorang muslim berhak atasnya menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal yang pemiliknya telah memenuhi syarat-syarat zakat yang nantinya akan dikeluarkan zakat nya setiap setahun sekali dan telah mencapai nishabnya. Nishab adalah batas minimal harta zakat bila seseorang telah memiliki harta sebesar itu, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian, batasan nishab hanya diperlukan oleh seseorang yang hartanya sedikit. Adapun zakat emas dikeluarkan seseorang yang memiliki jumlah harta besar , maka sudah dipastikan bahwa ia telah memenuhi nishab. Hal ini dengan syarat mencapai nishab, yaitu 85gram emas, yang mu'tabar adalah nilainya dan bukan ukurannya.⁹ Dari perhiasan yang tidak wajib dizakati adalah perhiasan yang dipakai dan dimanfaatkan. Inilah yang disebut perhiasan kenikmatan. Adapun yang dijadikan sebagai benda simpanan, dan pemiliknya menganggap sebagai kekayaan simpanan dan harta benda simpanan maka hal itu wajib dizakati.¹⁰

Terdapatnya kasus yang ditemukan di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim ialah pegadaian emas yang telah mencapai nishab tidak dikeluarkan zakatnya. Prakteknya yang terjadi mereka hanya menggadaikan emas nya untuk investasi yang dikelola sebagai pemutaran usaha yang sedang

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 256.

¹⁰ *Ibid*, h.292.

dijalaninya. Yang nantinya akan diambil kembali jika sudah mencapai masa pengambilannya.

Adapun prosedur gadai emas ini, kita hanya datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa emas yang ingin digadaikan. Emas yang digadaikan bias berupa warna emas atau emas berupa wara putih, dan bias berupa emas batangan maupun emas perhiasan. Setelah itu diproses dengan pengisian formulir pengajuan pembiayaan, serta menyerahkan KTP (*identitas*). Emas akan terlebih dahulu ditaksir, sesuai perhitungan dari pihak Pegadaian Syariah baru dapat mengambil pinjaman sebesar nilai yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah atau boleh kurang dari nilai taksiran dan tidak boleh lebih. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan boleh diperpanjang dengan cara membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang agunan). Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan angsuran per30 hari setelah terhitung akad atau bisa dibayarkan pada jatuh tempo berakhirnya pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka di rumuskan rumusan masalah yaitu:

“Apakah Wajib Mengeluarkan Zakat Pada Emas Yang di Gadaikan?”

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum mengenai zakat emas yang digadaikan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis:

Bagi masyarakat penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai hukum dana zakat yang sudah digadaikan untuk investasi abadi atau usaha.

b. Secara praktis:

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian pada Pegadaian Syari'ah Arif Rahman Hakim Antasari. Penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Dan juga jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*liberary research*) yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan dan dipelajari.¹²

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32

¹² *Ibid*, h.27

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya melukiskan variable demi variable. Metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat. Penelitian yang ditulis bertujuan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum yang berfokus terhadap pelaksanaan zakat emas yang telah digadaikan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti (subyek peneliti).¹³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti yaitu, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari yang mengetahui langsung tentang praktik pegadaian emas.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

¹³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.129.

buku-buku dan skripsi lain yang berkaitan dengan zakat emas yang digadaikan.¹⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah 5 nasabah yang melakukan pegadaian emas diatas 85gram di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁶ Dengan demikian karena subjeknya kurang dari 100 maka 5 orang dijadikan sampel, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi, mengingat sumber data yang digunakan tidak dalam rangka mewakili populasi yang ada tetapi lebih cenderung mewakili informasi dan karakteristik.

¹⁴ Soerjono soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Nur CAhaya, 1986), h.28.

¹⁵ *Ibid.*, h.22.

¹⁶ *Ibid.*, h.28.

4. Metode Pengumpulan Data

Seseorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Pengumpulan data ialah proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang menyatakan cara yang paling baik untuk menentukan seseorang mengapa bertindak laku dengan menanyakan secara langsung. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti penulis.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak Pegadaian Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung dan Para Nasabah untuk mendapatkan informasi atau keterangan data.

¹⁷ Lexy J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h.144.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme pegadaian emas di Pegadaian Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung.

c. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁹ Dalam hal ini observasi atau pengamatan secara langsung akan dilakukan pada Pegadaian Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu megoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen). Atau urusan rumusan masalah .

¹⁸*Ibid*, h.137.

¹⁹*Ibid*, h.54.

- c. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas. Kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

1. Zakat dari Segi Bahasa

Zakat ditinjau dari segi bahasa berarti, nama' kesuburan, thaharah kesucian, barakah keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier mensucikan.²⁰ Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan.

2. Zakat dari Segi Istilah

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT, kata zakat dalam terminologi Al-Quran sepadan dengan kata shadaqah.²¹

Para ulama sendiri mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.²²

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cetakan kedua, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), h.3.

²¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.75.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.7.

3. Zakat dari Segi Istilah Syariah

Zakat ialah sejumlah harta (uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin, serta anggota masyarakat lain yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.²³

Zakat menurut syariah terkandung dua aspek didalamnya:²⁴

- a. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat.
- b. Kedua, pensucian, karena zakat adalah pensucian atas kerasukan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaigus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Umpamannya di dalam Al-quran difirmankan dalam surah Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepadahakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

²³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cetakan V, (Bandung: Mizan, 2002), h.273.

²⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung, Tim Tafakur, 2011), h.13.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang sudah dijelaskan dalam al-quran dan hadits yang wajib dijalankan oleh semua umat Islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat.

B. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim, laki-laki, perempuan, dewasa dan belum dewasa, merdeka maupun hamba sahaya. Zakat ini disyariatkan untuk mensucikan jiwa orang-orang yang melaksanakan puasa dan sekaligus memberikan makan pada fakir miskin saat mereka akan melaksanakan idul fitri.²⁵

Zakat fitrah dapat diberikan langsung kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Tetapi, jika zakat diberikan kepada badan pengumpul zakat fitrah, untuk mereka bagi disaat tepat sebelum atau sesudah sholat hari raya, di malam atau siangya juga diperbolehkan.

Menurut Ibnu Qudhamah pembagian zakat fitrah sama dengan pembagian zakat harta dan masuk kedalam umum surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi Hasbi Ash-Shiddiqi dalam buku pedoman zakat

²⁵ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h.114.

menjelaskan bahwa sangat baik jika fitrah itu dibagi kepada fakir miskin saja.²⁶

Zakat fitri wajib ditunaikan pada bulan ramadhan. Dengan ketentuan zakat fitrah harus dibayarkan, yaitu 1 sha' (seantara dengan 2,6kg). Dan dibayarkan dengan makanan pokok.²⁷

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Dbolehkan membayar zakat fitrah pada awal ramadhan samapai terakhir buan puasa.
- b. Waktu yang wajib adalah mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan.
- c. Waktu sunnat, yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shlat idul fitri.²⁸

2. Zakat Mal

Mal berasal dari bahasa arab "maal" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Fungsinya sendiri berarti mensucikan, memberkahi, membersihkan harta yang dimiliki orang muslim.²⁹

Ketika seseorang mmiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain dalam hartanya. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat

²⁶ Hasby Ash-Shiddiqi, *Op.Cit.*, h.262-266.

²⁷ Agus Thayib Afif, Shabrina Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Al bana, 2010), h.65-67.

²⁸ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *FIQih Ibadah*, (Yogyakarta: All bana, 2010), h.65-67.

²⁹ Yayat Hidayat, *Op.Cit.*, h.115.

menghilangkan keberkahan harta yang dimilikinya dan tidak tersucikan dari harta.

Nishab emas dan jumlah zakatnya, apabila telah mencapai 20 dinar (85 gram), dan bila ia mengandung sedikit campuran, ia tetap dianggap emas murni, karna emas masih di campur dengan logam tertentu untuk menguatkan dan memadatkannya.³⁰

Pada Riwayat Bukhari Muslim dari Anas, waktu pembagian zakat mal, ia mengatakan: “bahwa aku pergi kepada Rasulullah Saw, membawa Abdullah bin Abi Thalhah untuk mencakapkannya, dan mendapati Nabi memegang stempel untuk zakat”. Pada riwayat yang kedua, Al-Bukhari dari ‘Uqban bin Al-Haris, dimana ‘Uqbah bin Al-haris menceritakan bahwa suatu waktu Nabi shalat ashar, maka setelah shalat segera beliau masuk rumah sebentar saja, dan ketika ditanya maka jawab beliau ialah: “aku telah meletakkan dirumahku sepotong tbr (emas perak) dari hasil zakat, aku tidak suka memperlalamkan harta zakat itu, karena itu segera aku membaginya.”

Dari hadits pertama, menunjukan tidak adanya halangan untuk ditunda penyalurannya. Karena tidak boleh ditunda tentu Nabi tidak memberitanda dulu harta zakat itu, begitu diterima langsung dibagi. Dari segi lain memang hal ini sama demikian, dengan qaidah jumhur bahwa *Al Ashlu Amri La Yaqtadil Faura*, bahwa prinsip perintah itu tidak mengandung ketentuan untuk segera dilaksanakan, tetapi memang utama

³⁰ Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunna*, (Jakarta: Beirut Publishing, April 2016), h.234.

untuk disegarkan.³¹ Dari hadits kedua, kita dapat ketentuan penyaluran harta itu segera sampai kepada mustahiq.

3. Zakat Harta Persekutuan

Zakat persekutuan adalah dua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu milik dua orang yang digabung menjadi satu dengan tujuan kerja sama atau lainnya. Zakat Persekutuan sendiri, dibagi dalam beberapa macam:

- a. Persekutuan antara dua orang yang wajib berzakat, masing-masing memiliki senisab zakat atau lebih, yang dimilikinya setahun penuh, berasal dari pembeli atau warisan atau lain sebagainya, sedangkan harta itu sejenis.
- b. Persekutuan antara dua orang yang wajib berzakat, masing-masing memiliki senisab harta yang tidak dimiliki bersama, tetapi persekutan antara keduanya bersifat bertetangga, harta terpisah dan dapat dibedakan.
- c. Pelaksanaan zakat persekutuan diantara kedua macam harta persekutuan tersebut dianggap satu harta, apabila jumlah harta persekutuan itu telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun bagian masing-masing pemilik harta tersebut belum mencapai nisab.³²

³¹ Alimuddin Ali, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (IAIN Raden Intan, Lampung: 1990), h.87-88.

³² Labil Mz, *fiqih Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h.398.

4. Zakat Piutang

Kewajibnya zakat pada piutang adalah orang yang mempunyai hutang yang mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat, jika telah haul, sebagaimana halnya harta lain yang ada pada tangannya. Dan apabila harta itu tidak ada ditangan, maka masih diwajibkan mengeluarkan zakatnya, sebagaimana halnya harta perdagangan yang tidak ada ditempat dan barang titipan.

Zakat itu wajib sekalipun ia mempunyai hutang-hutang yang dapat menghabiskan semua harta yang ada, atau mengurangnya dari nisab.³³

Jenis zakat piutang yang wajib dizakati ada tiga macam seperti:

- a. Piutang yang tidak wajib dizakati, apabila piutang tersebut berupa harta yang jenisnya memang tidak wajib dizakati. Misalkan seseorang memiliki piutang beberapa sha' gandum, maka jenis ini tidak wajib dizakati walaupun mencapai nishab.
- b. Piutang yang wajib dizakati seperti emas dan perak.
- c. Piutang yang dizakati tiap tahunnya, dengan catatan peminjamnya orang berada.

5. Zakat Rikaz (Harta Karun)

Rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria muzaki seperti muslim, dan telah mencapai nishab maka wajib zakat sebesar 20%. Yang disimpan

³³ *Ibid*, h.401.

di Baitulmal untuk kepentingan dan maslahat umat. Sedangkan sisanya diberikan kepada penemunya, dengan catatan daerah penemunya mubah, yaitu daerah tidak ada pemiliknya.

Menurut pendapat ulama Hanafi dan hambali, rikaz yang wajib dikeluarkan zaatnya dalam tembaga, perak, besi, timah, kuningan dan sejenisnya.

Pengeluaran dari zakat rikaz sendiri sebanyak,seperlima atau 20%. Setelah dikeluarkan zakatnya, sisa yang 80% adalah hak pemilik tanah, jika pemiliknya diketahui.³⁴

C. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Quran

Abdul Baqi menjelaskan, bahwa al-qur'an menyebut kata zakat sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat.³⁵ Sebagai Isyarat bahwa kedua hal tersebut sama pentingnya dalam Islam.

Salahsatunya yang terdapat dalam firman Allah SWT:³⁶

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Arinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukun.

³⁴ *Ibid*, h.403.

³⁵ Khoirul Abror, *fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h.188.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.45.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Walaupun mempunyai kata yang berbeda dengan zakat, tetapi dipergunakan untuk menunjukan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman AllahSWT:³⁷

Q. S At-Taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Q. S At-Taubah (9) ayat 60³⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

³⁷ M.Iman Pamungkas, H.Maman Suharman, *Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), h.165.

³⁸ *Ibid*, h.166.

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat dengan sempurna baik kadar ataupun cara pemberiannya tanpa menunda-nunda.³⁹

2. Hadits

Zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT, dan hadits Rasulullah SAW.⁴⁰

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ
Artinya: “Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat tidak sah.”⁴¹ (H.R. Imam Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umbar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi: mengaku bahwasannya tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, h.13.

(Rasul Allah, menunaikan shalat menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan.” (H.R. Bukhari Muslim).⁴²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ
اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَبْيَتَانِ
يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزَمِيهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ
أَنَا كَنْزُكَ

Artinya : “Barangsiapa dikaruniai harta oleh Allah, tapi tidak mau membayarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat, hartanya akan diwujudkan sebagai ular ganas yang memiliki dua taring bisa yang melihatnya dan menggigit kedua sisi mulutnya seraya berkata, 'Akulah hartamu akulah barang simpananku.'”⁴³
(H.R. Bukhari Muslim)

3. Ijma

Kaum muslimin di seluruh duni sepakat, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu, para sahabat juga sepakat untuk mengeluarkan zakat.⁴⁴

4. Aturan perundang-undangan

Potensi zakat baik penerimaan maupun pengeluarannya cukup besar. Oleh karna itu menurut ajaran Islam zaat sebaiknya dipungut oleh negara. Nabi saw melaksanakannya ketika berperan seagai Kepala Negara Madinah dengan memungut zakat dari orang-orang yang mampu. Beliau

⁴² Muhammad Daud Abd Al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, Juz II, terjemah oleh Muslih Shabir, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h.312.

⁴³ Zainuddin Hamidy, et. Al. *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992). h.104.

⁴⁴ Abbas Karabah, *Al Din Wa Al-Zakat 'ala Mazhib Al Ar Ba'ah Dar Al Kutub* (Mesir: Al-Arabi, 1953), h.312

juga memerintahkan pemungutan ini kepada para sahabat yang bertugas sebagai gubernur di wilayah masing-masing.⁴⁵

Selain Al-Quran dan Al-Hadits sebagai dasar hukum zakat pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya, yakni iman atau orang yang bertugas untuk mengumpulkannya (Badan/Lembaga Amil Zakat).

Para Ulama membagi dalam dua kategori dalam syarat wajib zakat yaitu:

1. Syarat seseorang yang diwajibkan berzakat:
 - a. Islam

Karna zakat merupakan ibadah yang berfungsi mensucikan jiwa orang yang berazakat (muzaki) maka hanya orang muslimlah yang dikenakan kewajiban. Sedangkan orang kafir bukanlah orang yang ahli ibadah seperti yang disyariatkan dalam Islam. Ketentuan ini telah menjadi ijma' ulama.

- b. Merdeka

⁴⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h.173.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka, seperti: hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak atas harta yang dimilikinya. Sehingga tuan dari hamba sahaya tersebut yang kemudian diwajibkan untuk membayar zakatnya, baik atas zakat peribadinya sendiri, ataupun kepemilikan hamba sahayanya tersebut.

c. Baligh dan Berakal

Menurut Mazhab hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat, sehingga zakat anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat. Karna keduanya tidak termasuk pula dalam orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukanlah syarat sehingga zakat tetap wajib dikeluarkan melalui wali (orang yang mengasuhnya).⁴⁶

2. Syarat Harta yang Wajib dikeluarkan zakat

a. Harta tersebut didapatkan secara baik dan halal

Harta yang haram, baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

b. Harta milik sempurna

Yang dimaksud dalam istilah ini adalah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan.

c. Harta berkembang dan berpotensi dikembangkan

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 1997), h.100.

Disebut juga dengan istilah harta produktif (Al-Namaa') seperti melalui usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun pihak lain.

d. Harta mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab maka kekayaan tersebut wajib untuk dizakatkan. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat yang lain.

e. Harta mencapai haul

Haul adalah perputaran masa satu tahun. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai satu tahun dimiliki secara sempurna. Syarat ini tidak mutlak karena, ada beberapa sumber zakat yang seperti zakat pertanian, dan rikaz tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun.

3. Tujuan dan Manfaat Mengeluarkan Zakat

Tujuan zakat ialah sebagai kewajiban bagi muslim untuk mendidik setiap muslim agar menjadi masyarakat yang baik, memiliki kecintaan terhadap hartanya untuk senantiasa mempertahankan di jalan Allah SWT dengan membantu sesama manusia, yang akan tercapai makna inti ibadah yang sempurna dimata Allah SWT.

Terdapatnya banyak manfaat sehabis mengeluarkan zakat, beberapa nya adalah:⁴⁷

a. Hikmah yang dapat dikembalikan kepada pihak penerima, antara lain:

- 1) Dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan lupa akan harta
- 2) Dapat membiasakan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- 3) Dapat melaksanakan kesyukuran hamba kepada pemberi nikmat.

b. Hikmah yang dapat diberikan kepada penerima, antara lain:

- 1) Dapat untuk memenuhi kebutuhan para penerima yang membutuhkan.
- 2) Dapat mendorong penerima menjadi orang yang terpanggil untuk melaksanakan kebijakan seperti itu.

c. Hikmah yang kembali kepada harta itu sendiri antara lain:

- 1) Dapat difungsikan harta sebagai nikmat Allah sebagai bentuk syukur hambanya.
- 2) Dapat dihindarkan uang sebagai tujuan hidup dalam masyarakat, tetapi dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan hidup anggota masyarakat.

d. Hikmah yang kembali kepada pihak pemberi, penerima dan masyarakat, antaran lain:

- 1) Zakat dapat membawa hikmah terjalinnya hubungan yang baik antar fuqura, masakin dan aghniya.

⁴⁷ Alimuddin Ali, *Op.Cit*, h.77.

- 2) Zakat dapat membawa hikmah terpenuhinya sebagai keperluan masyarakat.

E. Harta Benda Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam, yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah jika telah memenuhi nisab dan haul. Al-Qur'an sendiri merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan". Selanjutnya persoalan harta yang wajib dizakati, diserahkan kepada sunnah Nabi, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Kategori ini termasuk ke dalam zakat mal. Terlepas dari perbedaan tentang penetapan jenis harta yang wajib dizakati, secara umum syara' menentukan sebagai berikut:⁴⁸

1. Zakat Nuqud (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, chek, giro, saham, dll).

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, sebagai sering dijadikan perhiasan, juga emas dan perak dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta potensial/berkembang. Pengertian berkembang itu yang memberi keuntungan investasi, sedangkan kekayaan yang tidak dapat dikembangkan ada dua sebab, pertama karna kekayaan itu sendiri, misalkan kekayaan itu dirampas orang lain, piutang yang tidak dapat diharapkan kembali, dan yang kedua apabila

⁴⁸ Departmen Agama RI, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Jakarta: 2008), h. 12.

kesalahan pada pemiliknya, agama tidak memandang dapat dimaafkan karna setiap muslim dituntut untuk mencari upaya yang legal untuk menginvestsian kekayaannya.⁴⁹

Emas dan perak juga dapat dijadikan investasi usaha beberapa orang, dalam bentuk batangan maupun perhiasan. Para ulama, berbeda pendapat atas pendapat mengenai zakat perhiasan, yang terbuat dari emas dan perak. Perbedaan pendapat ini terjadi pada kalangan sahabat, para tabi'in dan fuqaha.

Perkataan tentang adanya zakat perhiasan berumber dari riwayat Said bin Musaiyib, Said bin Jabir, 'Atha, Mujahid, Abdullah bin Syadad, Jabir bin Zaid, Ibnu Syibramah, Maimun bin Mahran, az-Zahri, dan at-Tsauri, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya.⁵⁰ Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang dipakai sebagai kekayaan dan harta benda simpanan maka hal itu wajib zakat.⁵¹

Mereka mengatakan bahwa emas dan perak itu merupakan seindah-indahnya hasil bumi yang diciptakan Allah untuk dijadikan uang, sehingga dapat juga dipakai sebagai alat perhiasan manusia. Dari sudut ini, mereka mewajibkan zakat (perhiasan emas dan perak) sebagaimana diwajibkan pada semua bentuk leburan logam.

Sebagaimana firman Allah SWT Surah At-Taubah (9) 34-35

⁴⁹ Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, Cetakan XII, 2011), h.138.

⁵⁰ *Ibid*, h.277.

⁵¹ *Ibid*, h.292.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُظُّهُرُهُمْ ۚ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁵²

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, perhiasan yang mencapai batas berlebih-lebihan dan melewati batas kebiasaan maka waajib dizakati. Berdasarkan riwayat yang disampaikan Abdullah bin Amru bin Al-Ash suatu ketika seorang perempuan Yaman ke rumah Rasulullah Saw dan pada tangan kedua anaknya ada dua gelang dari emas yang besar, kemudian Rasulullah Saw bersabda “Bahwa kebiasaan tesebut melebihi kebiasaan dan ada unsur berlebih di dalamnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.”. Barangkali inilah yang menyebabkan Abdullah bin Amru

⁵² Fiqih 4 Mazhab, *Op.Cit.*, h.169.

mengeluarkan zakat dari perhiasan putri-putrinya, bahwa ia telah memberikan perhiasan kepada ketiga putrinya dengan 6000 dinar. Pembayaran zakat perhiasan yang berlebih yaitu dengan cara membayarkan seluruh jumlah perhiasan pada saat itu. Ditentukan bahwa keterangan 20 dinar adalah dinar Islam yang beratnya 1 mitsqal berarti 20 dinar sama dengan 20 mitsqal. Besar 20 dinar di Indonesia, yaitu: 85 gram dinar emas sama dengan (24 karat), 97 gram emas (21 karat), 112 gram dinar emas (18 karat).

Sebagaimana ketentuan, nishab emas 20 dinar adalah 85 gram dengan lama kepemilikan satu tahun dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan emas.⁵³ Adapun nishab perak adalah 595 gram dengan satu tahun atau lebih masa kepemilikannya sebagai haulnya dalam jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.⁵⁴ Ketentuan ini, diperkuat oleh Ali r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نَصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

Artinya: “kamu tidak wajib membayar zakat emas, kecuali ketika kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai satu tahun, kamu wajib mengeluarkan

⁵³ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h.296.

⁵⁴ Didin Hafiduddin, *Op. Cit.*, h.38.

setengah dinar. Selebihnya juga dihitung seperti itu. Suatu harta tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai haul.”⁵⁵
(H.R. Abu Dawud)

Mereka yang mengatakan tidak adanya wajib zakat, Ibnu Hazm berkata, bahwa Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar berkata “Tidak ada zakat pada perhiasan.” Ini merupakan perkataan Asma binti Abu Bakr, dan diriwayatkan dari Aisyah, dan dinyatakan shahih. Terdapatnya alasan tidak wajib zakat karna, zakat diwajibkan pada harta yang hidup lagi menghidupkan, dan perhiasan tidaklah termasuk dalam zakat ini, ia keluar dari kategori hidup lagi menghidupkan lantaran statusnya sebagai perhiasan yang dinikmati.⁵⁶ Sa'id bin al-Musayyab menyatakan bahwa yang tidak termasuk wajib zakat adalah perhiasan yang dipakai dan dimanfaatkan.

Kewajiban zakat pada harta/emas yang digadaikan, dilihat dari harta tersebut termasuk harta yang harus dizakati ataupun bukan. Sebagaimana di lihat terlebih dahulu isi dari akad gadai tersebut. Ada akad gadai yang sebenarnya sudah jual beli, dimana kita menggadaikan harta itu sudah menjual nya, maka status harta itu bukan milik kita lagi. Kedua, akad gadai yang bukan jual beli, ketika menggadaikan harta status nya cuma di jadikan barang jaminan dan pemilinnya tetap kita, dan tidaklah harta itu boleh dijual lagi (lelang) kecuali dengan seizin kita.

Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud milik penuh adalah kepemilikan itu asli dan dimiiki. Imam Maliki mengatakan, kepemilikan penuh adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang

⁵⁵ Sunan Abu Dawud, *az-Zakah, Bab fi zakati as-Saimah*, Jilid II, h.102-103, hadits nomor 1573.

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Op, Cit*, h.279.

dimiliki. Imam Syafi'i mengatakan, yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Imam Hambali mengatakan, harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan dengan bebas.⁵⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai termasuk kepemilikan kekayaan tidak penuh, dari pihak peminjam. Kekuasaannya bukanlah sebagai pemilik, tetapi hanyalah pemakai dan pengambil manfaat, sedangkan kekayaan itu masih milik sempurna yang dapat mengambilnya kapanpun ia kehendaki dari pihak yang meminjamkan.

Zakat gadai sendiri termasuk dalam zakat piutang, karna di dalamnya terdapat pinjaman uang dalam batas waktu tertentu, dengan menyerahkan barang sebagai tanggungannya. Hak milik yang menjadi jaminan hutang sendiri, terdapat beberapa pertanyaan akan kewajiban adanya zakat yang harus dibayar orang yang meminjamkan berdasarkan ialah pemiliknya yang sebenarnya atautkah atas orang yang meminjam bahwa dialah yang menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman itu.

Berdasarkan pemahaman atas akad gadai, itu sama halnya dengan pemahaman pinjaman yang di kemukakan oleh (*jumhur*) ahli fikih, bahwa pinjaman itu ada dua macam:⁵⁸

- 1) Pinjaman yang diharapkan kembali, yaitu pinjaman yang jelas dari orang yang berkecukupan. Dalam hal ini zakatnya dimajukan

⁵⁷ Wahbah az-zuhaili, *Op.Cit.*, h.174-176.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h.135-136.

bersama dengan kekayaan yang ada setiap tahun. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Umar, Usman, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah dari pihak sahabat, dan dikuatkan oleh Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim, dan Mimun bin Mahran dari pihak *tabi'in*.

- 2) Pinjaman yang diharapkan tidak kembali lagi, yaitu pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan yang tidak akan mungkin membayarnya kembali, atau orang yang tidak mungkin mengakui hutangnya sedangkan pemiliknya tidak mempunyai bukti apapun.

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

- a) Ia mengeluarkan zakatnya untuk selama tahun-tahun ditangannya.

Ini pendapat Ali dan Ibnu Abbas.

- b) Ia mengeluarkan zakatnya untuk setahun saja. Pendapat Hasan, dan Umar bin Abdul Aziz merupakan pendapat imam Malik tentang semua jenis hutang, diharapkan kembali atau tidak.

- c) Ia tidak mengeluarkan zakatnya baik untuk bertahun-tahun maupun untuk setaun saja. Pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, kekayaan itu bagi mereka sama dengan kekayaan yang baru mulai digunakan oleh pemiliknya pada tahun itu.

Ibnu Hazm mengatakan, pinjaman tidaklah wajib zakat. Pengertiannya adalah keduanya tidak wajib zakat baik pemberi ataupun yang meminjam. Dengan alasan, dari pihak peminjam kepemilikan kekayaan tidaklah miliknya penuh, tetapi hanyalah pemakai dan penerima manfaat. Dari pihak yang meminjamkan, kekayaan itu tidaklah

secara nyata berada ditangannya tetapi digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, yang demikian berarti pemilikannya tidak penuh.⁵⁹

Sayyid Sabiq sendiri mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang telah wajib dizakati, sedangkan ia memiliki utang yang harus dibayar, maka ia harus membayar utang nya dengan harta tersebut dan membayar zakat jika sisanya mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, ia tidak wajib zakat membayar zakat karena dalam keadaan itu ia termasuk orang yang fakir.⁶⁰ Wajib zakat pada harta tersebut karena, gadaian tidak menggugurkan kewajiban zakat.⁶¹

Menurut Imam Maliki, tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas orang yang menggadai, karena barang tidak ada ditangannya sebagai kepemilikan yang penuh.⁶² Imam Hambali mengatakan, bahwa hutang dapat menggugurkan kewajiban zakat secara mutlak. Pendapat ini sejalan juga dengan pemiiran Abu Hanifah, diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, Makhul, dan at-Tsauri.⁶³

Imam Syafi’i mengatakan, hutang tidak menghlangi kewajiban zakat karena, zakat tergantung dengn barang itu, hutang tergantung dngan tanggungan. Orang yang berhutang wajib membayar zakat harta yang dipinjam oleh oranglain, jika berlalu satu tahun, sementaraharta itu dalam

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h.134.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.59.

⁶¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Ensikloedia Zakat*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Jakarta, Cetakan ke III,2012) , h.69.

⁶² Wahbah az-zuhaili, *Op.Cit.*, h.175.

⁶³ *Ibid*, h.179.

kepemilikannya. Sebab, dengan menghutang dia telah memiliki harta itu dengan kepemilikan yang sempurna.⁶⁴

2. Zakat al-Hawasyi/al-An'am (zakat hewan ternak)

a) Unta

Menurut ijma' ulama dan hadis-hadis, maka setiap muslim yang memiliki 5 ekor unta atau lebih dan telah memilikinya satu tahun wajib mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 1
Nishab Zakat Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-18 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45 ekor	1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60 ekor	1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75 ekor	1 ekor unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90 ekor	2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120 ekor	2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih)

b) Sapi/Kerbau

⁶⁴ *Ibid*, h.176.

⁶⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Cilandak Barat: PT Mizan Publika, 2008), h.499.

Menurut Hadist Rasulullah SAW, kewajiban zakat terhadap sapi/kerbau adalah minimal 30 ekor. Berikut inilah ketentuan-ketentuannya:⁶⁶

Tabel 2

Nishab Zakat Sapi/Kerbau

Jumlah Sapi/Kebau	Besar Zakat
30-39 ekor	1 ekor
40-59 ekor	1 ekor
60-69 ekor	2 ekor
80-89 ekor	2 ekor
90-99 ekor	3 ekor
Setiap 100 ekor	2ekor

c) Kambing/Domba

Menurut hadis dan ijma' kambing dan domba wajib dikeluarkan zakatnya dengan jumlah 40 ekor atau lebih, dan bila dikumpulkan menjadi satu merupakan dua kelas yang dijadikan satu jenis. Sebagaimana ketentuan-ketentuan berikut:⁶⁷

Tabel 3

Kambing/Domba

Jumlah Kambing/Domba	Besar Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-399 ekor	3 ekor kambing
400-499 ekor	4 ekor kambing

⁶⁶ Khorul Abror, *Op.Cit*, h.217.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h.205.

500-599 ekor	5 ekor kambing
Setiap 100 ekor	1 ekor kambing

3. Zakat al-Tijarah yaitu segala macam harta dagangan.

Para Ulama fiqh berpendapat bahwa nishab pada barang yang diperdagangkan dikenakan seperti harga awal dan diperhitungkan seperti nilai mata uang. Barang dagang yang dizakati harus genap satu tahun.

Zakat terhadap barang dagangan dibayarkan kembali menggunakan barang dagangan itu sendiri, tak diperhitungkan oleh harganya. Hal ini disampaikan oleh Al-Muzani. Namun ketiga mazhab, yaitu Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan bahwa *mudir* (pedagang yang tidak membuat pembukuan pembelian dan penjualan pada barang dagangannya) maupun bukan *mudir* ditetapkan dengan hukum yang sama.

Imam Maliki berpendapat lain, menyatakan dikenakan bagi para pedagang yang mencatat secara rinci waktu pembelian barang dagangannya. Namun para *mudir*, maka perhitungannya dimulai setelah masuk satu tahun masa berdagangannya.

Beberapa ahli fiqh menyampaikan bahwa zakat untuk barang dengan dibayarkan berdasarkan nilai harga barang pada saat dibeli, buka

nilai akhir harga barang tersebut. Kesepakatan disampaikan oleh para imam mazhab, bahwa barang dagangan dikenakan sebesar 2,5%.⁶⁸

Dalil mengenai zakat perdagangan ini disampaikan dalam firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah (2) : 267.⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

4. Zakat al-Ziraa'ah (zakat pertanian) seperti gandum, beras, dan sejenis itu semua.

Para ulama sepakat tentang kewajiban wajib zakat pertanian, karena berdasarkan dalil Al-quran dan hadits yang bersifat qath'i namun berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat. Pendapat yang paling kuat untuk dipegang Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamid, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib untuk dikenakan zakat tanpa membedakan

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dn Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h.45.

⁶⁹ Fiqih 4 Mazhab, *Op.Cit.*, h.177.

makanan pokok ataupun bukan. Besar pengeluaran 10% atau 5% dari hasil keseluruhan tani.

Pengeluaran zakatnya tidak harus dilakukan setiap kali panen. Kadar zakatnya jika diari dengan air sungai atau air hujan adalah 1/10 (10%), namun jika dialiri dengan kincir angin yang ditarik oleh binatang atau disirami dengan alat yang memaai biaya, zakatnya menurut perbandingan tersebut diatas.⁷⁰

5. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan dalam keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi, dokter, arsitek, ataupun pelukis. Yang dilakukan bersama-sama misalnya, pegawai dengan menggunakan upah dan gaji.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besar zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak.

Berdasarkan penjelasan diatas, Yusuf al-Qarda menengahkan realita zaman bahwa sumber-sumber kekayaan tidak terpaku pada teks masa lalu sedangkan masa kini banyak perubahan menurut konteksnya.

6. Zakat Hasil Tambang

⁷⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2006), h.204.

Hasil tambang tidak disyariatkan haul, zakatnya wajib dibayarkan ketika barang itu telah digali. Semua hasil yang digali dari daratan maupun laut. Sebagaimana ketentuan-ketentuan berikut:⁷¹

Tabel 4
Zakat Hasil Tambang

Jenis Tambang	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah,	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan. Kadar zakatnya 20%

⁷¹ Departmen Agama RI, *Op.Cit*, h.26.

tembaga, dsb				
Tambang batu- batuan, bara,mar mer, dsb	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila di perdagangan.
Tambang miyak gas	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika memperoleh	

F. Mustahik Zakat

Abu Dawud meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. Lalu berkata kepada beliau, “berilah aku bagian dari harta sedekah”, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Sesungguhnya Allah tidak rela akan keputusan nabinya maupun orang lain dalam hal sedekah, sehingga Allah memberi keputusan sendiri dalam hal sedekah ini dan dia membagikan harta sedekah kepada 8 golongan, jika memang kamu termasuk salah satu diantara delapan golongan tersebut, maka aku akan memberi hakmu. Dalam Al-Qur'an menjelaskan dan menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat. Ayat inimulanya turun sbagai bantahan terhadap orang-orang munafik yang iri jika melihat harta zakat dan mereka mencela Rasulullah. Karena beliau tidak memenuhi keinginan mereka mendapatkan sebagian harta-harta.⁷²

Adapun penjelasan 8 golongan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Fakir

⁷² Said Hawwa, *Al Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h.71.

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Miskin

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar sebagian kebutuhannya, namun juga tidak mencukupi.

c. Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan mengumpulkan dan membagikan zakat

Adapun syarat-syarat amil zakat:⁷³

- 1) Muslim
- 2) Mukallaf (orang yang sudah dewasa, sehat akal dan pikirannya).
- 3) Amanah
- 4) Memahami hukum zakat
- 5) Terampil
- 6) Tidak termasuk yang haram menerima zakat

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, atau yang masih dimantapkan hatinya agar tetap dalam keimanan.

Menurut Sayyid Sabiq, Mu'allaf yaitu golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman

⁷³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung; Tim Tafakur, 2011), h.195.

disebabkan belum menetapnya keimanan mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.⁷⁴

e. Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah hamba-haamba sahaya yang diberikan tuannya kesempatan untuk menebus dirinya, sehingga untuk membebaskannya dari perbudakan, maka dibantu dengan zakat kepadanya.

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang terhimpit utang. Mereka dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mereka yang pernah berutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan. Kedua, mereka yang menjadi penengah antara dua kelompok untuk mendamaikan sengketa, sehingga membebani dirinya dengan membayarkannya yang menghabiskan hartanya.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Musafir yang kehabisan ongkos ditengah perjalanan juga termasuk di dalamnya. Sehingga boleh diberikan zakat.

h. Sabillah

Di dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan menjaga perbatasan.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), h.133.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari

Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah SWT, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam

pengelolaan produk rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syariah yang semula di bawah binaan usaha lain. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselelarkan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian (Persero). Cabang Pegadaian Syariah ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁷⁵

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di

⁷⁵ Revi Yuda Putra, Pengelola Unit/Penaksir, PT Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung, 27 Agustus 2018.

samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembarakan. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Pegadaian Syariah.

Sampai saat ini ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syariah. PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis syariah ini bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, pada awal September 2003 diluncurkan gadai berbasis syariah bernama Pegadaian Syariah.

Empat lainnya adalah perbankan syariah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syariah dan Bank Jabar Syariah. bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI sebagai penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana operasionalnya.⁷⁶

Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian, perjanjian kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan Nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain

⁷⁶ “Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (17 Januari 2018).

mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.⁷⁷

Keberadaan Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei tahun 2002 ditanda tangani kerjasama antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana.⁷⁸ PT Pegadaian Syariah UPC Arif Rahman Hakim Bandar Lampung didirikan dengan pertimbangan tertentu. PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Arif Rahman Hakim Bandar Lampung didirikan dalam rangka membantu pelayanan transaksi syariah yang ada di kantor pegadaian pusat, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, dan tanpa *riba*.

PT Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah dikarenakan dinamika didalam masyarakat terkait *riba* dalam sistem gadai konvensional. Didirikannya PT Pegadaian Syariah UPS Arif Rahman Hakim Bandar Lampung beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 165, Bandar Lampung, Telpn (0721) 781735.⁷⁹

⁷⁷Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.

⁷⁸ Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (27 Agustus 2018).

⁷⁹Revi Yuda Putra, wawancara dengan karyawan, PT Pegadaian Syariah UPS Arif Rahman Hakim Bandar Lampung, 27 Agustus 2018.

2. Visi dan Misi

PT Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu:⁸⁰

1. Visi Pegadaian

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”

2. Misi Pegadaian

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

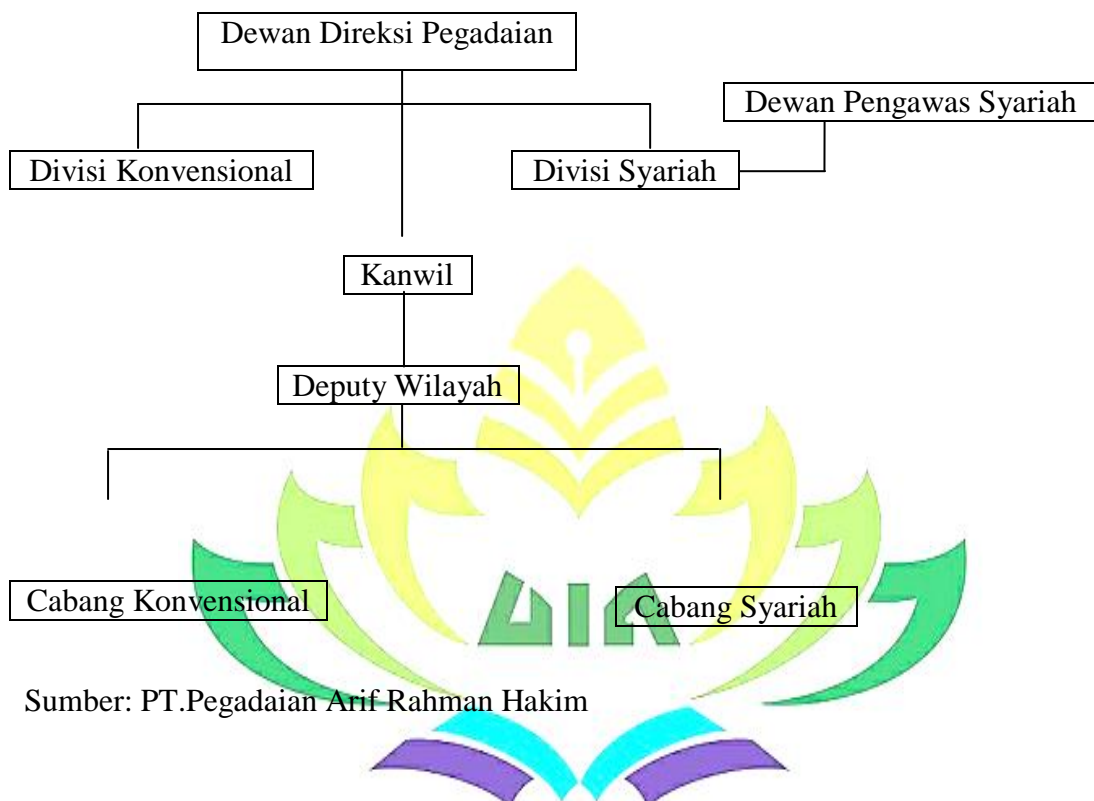
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syariah terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat pusat dan tingkat wilayah.

⁸⁰ <http://bit.ly/pegadaian>, *Profil Pegadaian*, (diakses 27 Agustus 2018).

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah



Sumber: PT.Pegadaian Arif Rahman Hakim

Uraian struktur organisasi diatas sebagai berikut:

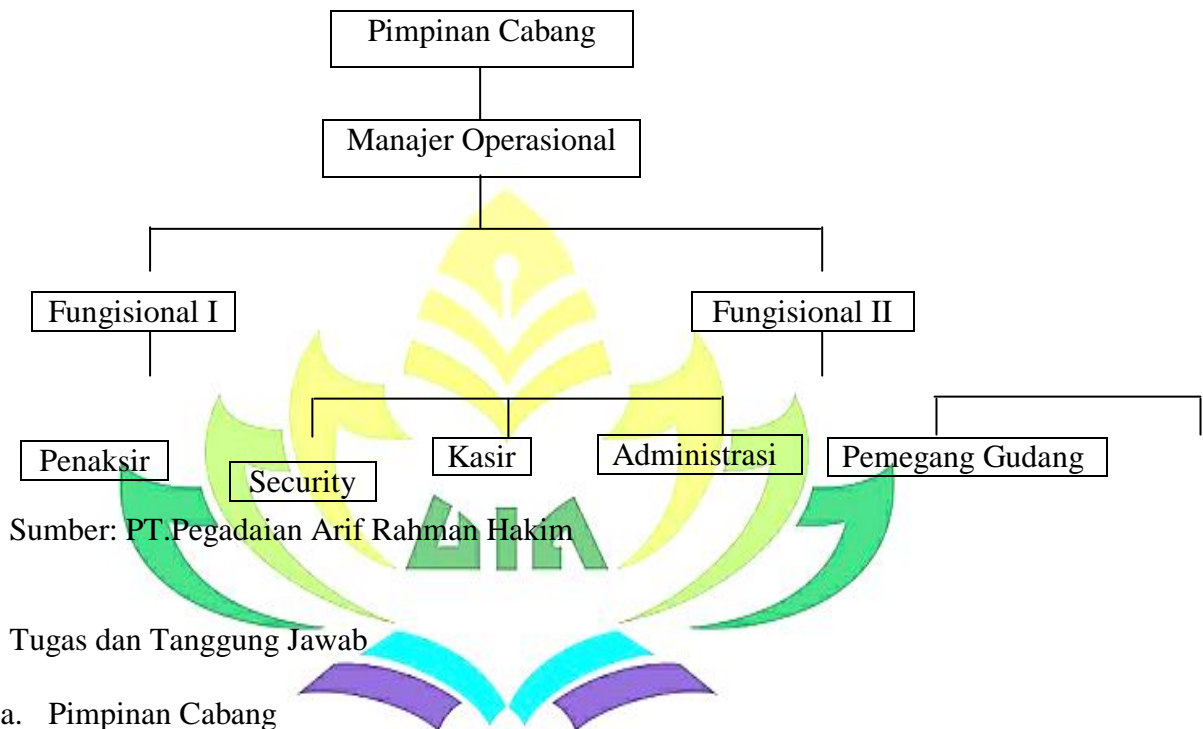
1. Tingkat Pusat Struktur organisasi tingkat pusat ini dipimpin oleh dewan direksi, tugas dewan direksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan;
 - b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari general manager;
 - c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan;
 - d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham (kemen BUMN) atas kinerja perusahaan.

Selain itu direksi PT Pegadaian membawahi langsung terhadap divisi usaha konvensional dan divisi usaha syariah. Terhadap kegiatan usaha yang berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
2. Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam mengkomunikasi usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
3. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya;
4. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
5. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
6. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
 - a. Organisasi Tingkat Wilayah terdiri atas:
 - 1) Kantor Wilayah;
 - 2) Deputy Wilayah;
 - 3) Kantor Cabang;

Gambar 1.2

**Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar
Lampung (Pegadaian Syariah Pusat)**

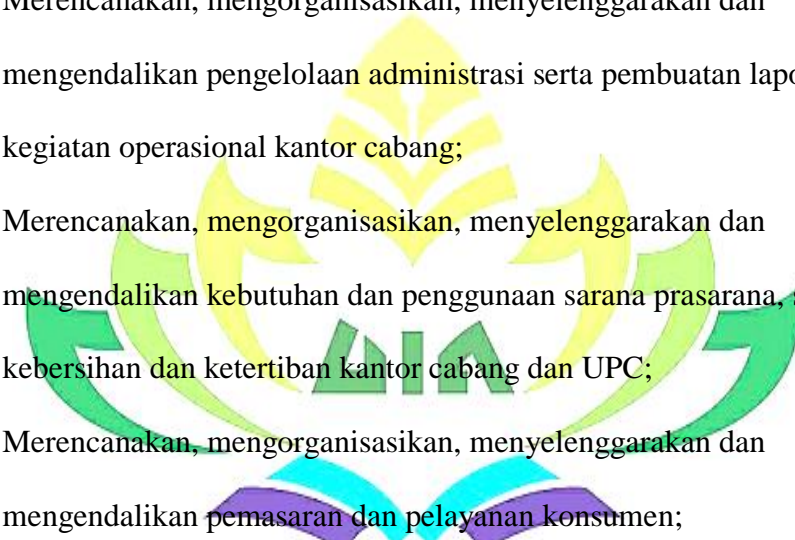


1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pimpinan Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Berta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan;
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain;

- 
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC;
 - 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah;
 - 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja;
 - 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang;
 - 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC;
 - 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen;
 - 9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Manajer Operasional

Fungsi Manajer Operasional adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain;
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit;
- 3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram;
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang;
- 5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja;
- 6) Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

c. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman;

- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang;
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

d. Administrasi

Fungsi administrasi sebagai pendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Cabang Syariah, sesuai dengan kewenangannya. Administrasi mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Syariah.

e. Pemegang Gudang

Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka

ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong;
- 2) Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang;
- 3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya;
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman;
- 5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain;
- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

f. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

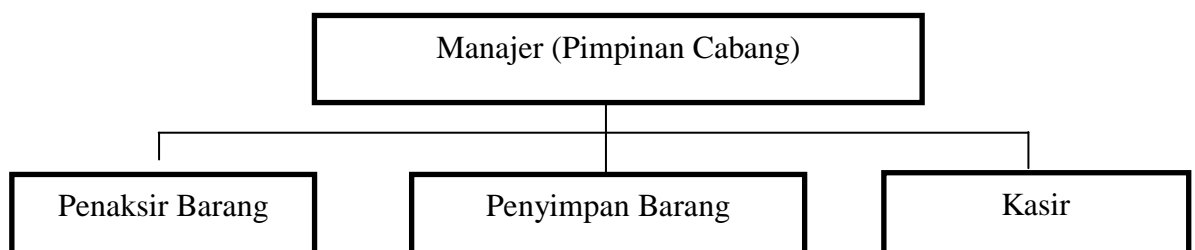
- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
 - 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC;
- g. Security (Keamanan)
- Tugasnya : Mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Arif Rahman Hakim

Bandar Lampung

Struktur Organisasi Kantor



Sumber: PT.Pegadaian Arif Rahman Hakim

B. Produk dan Layanan

Pegadaian Syariah UPS Arif Rahman Hakim dalam menunjang usahanya memiliki produk dan jasa sebagai berikut:

1. Produk

a. *Ar-Rum* (Kredit *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro)/*Ar-Rum* BPKB

Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahn*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

Ar-Rum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil. Dalam produk *Ar-Rum* ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹

Keunggulan :⁸²

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014;
- 2) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah;
- 3) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah;
- 4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan serta dapat dilunasi sewaktu-waktu;
- 5) Pegadaian Syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif;
- 6) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah;
- 7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan tetap dapat digunakan nasabah;
- 8) *Marhun Bih* (uang pinjaman) sampai dengan 200 juta.

Persyaratan :

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun;
- 2) Fotocopy KTP dan kartu keluarga;

⁸¹Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 61.

⁸²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 739.

3) Menyerahkan dokumen yang diperlukan :

- a) Surat keterangan usaha;
- b) BPKB Asli;
- c) Fotocopy STNK dan faktur pembelian.

b. *Ar-Rum* Haji (Gadai Emas untuk ke Tanah Suci)

Ar-Rum Haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. *Ar-Rum* Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji). Dalam produk *Ar-Rum* Haji ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Ali Imran, ayat 97 :

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁸³

Syarat-syarat memperoleh Pinjaman *Ar-Rum* Haji :

⁸³*Ibid.*, h. 62.

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya;
 - 2) Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun;
 - 3) *Ar-Rum* Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan Kementrian Agama. *Ar-Rum* Emas (Gadai Emas Pembiayaan Berkala)
- c. *Ar-Rum* Emas merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Dalam produk *Ar-Rum* ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁴

Keunggulan :

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai Fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014;
- 2) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan;
- 3) Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 500 juta;
- 4) Proses cepat tanpa survey;
- 5) Perlindungan atas risiko kehilangan/kerusakan barang;
- 6) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) yang kompetitif yang dihitung dari nilai barang.

Persyaratan :

- 1) Copy KTP/SIM/Passport;
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas dan berlian.

d. *Amanah* (Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah)

Pembiayaan *amanah* dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah, kendaraan dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Dalam produk *Amanah* ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. An-Nisaa ayat 58 :

⁸⁴*Ibid.*, h. 61.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁸⁵

Keunggulan :

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014;
- 2) Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;
- 3) Uang muka terjangkau;
- 4) Biaya (*mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran.

Persyaratan untuk karyawan tetap :

- 1) Masa kerja minimal 2 tahun;
- 2) Usia 21 tahun s/d masa kerja 1 tahun sebelum pensiun;
- 3) Usia saat jatuh tempo maksimal usia pensiun.

Persyaratan untuk pengusaha mikro :

- 1) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun;
- 2) Usia maksimal 21 tahun;
- 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.

⁸⁵*Ibid.* h.70.

e. MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi).

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan pada tahun pertama peluncurannya, produk ini cukup mendapatkan respon yang baik dari pelanggan.

Persyaratan :

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli;
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

2. Layanan

a. Penaksir Nilai Barang

Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan taksir, serta petugas yang berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya, barang yang akan ditaksir berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran;

b. Penitipan Barang (*Ijarah*)

Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman seperti ; barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll) yang dititipkan di Pegadaian Syariah. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan;

c. *Gold Counter* (Galery 24)

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain;

d. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO

merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan :

- 1) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;
- 2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi;
- 3) Biaya administrasi Kompetitif;
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas;
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan;
- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan;
- 7) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan :

- 1) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.⁸⁶

C. Mekanisme Gadai Perhiasan Emas

1. Cara Menggadai Emas

Cara memperoleh pinjaman *râhin* (gadai) cukup mudah, hanya dengan membawa barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya *râhin* akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) dari nilai taksiran. Atau dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. *Râhin* (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan guna peminjaman.
2. Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *marhun* (barang jaminan) yang akan dijaminkan.
3. Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang dijaminkan.
4. *Râhin* menerima FPP sebagai bukti penyerahan *marhun* dari penaksir.

⁸⁶Revi Yuda Putra, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Arif Rahman Hakim Bandar Lampung, 27 Agustus 2018.

5. Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, dengan cara melakukan pengecekan Standar Taksiran Logam (STL) x Gram (barang jaminan) = uang pinjaman di peroleh dari 92% taksiran tersebut.
6. Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *râhin* serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.
7. Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip untuk nomor *marhun*.
8. *Râhin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)
9. Penaksir menyerahkan *marhun* yang telah dilipat kepada bagian gudang.
10. *Râhin* menerima sejumlah uang UP (*marhun bih*) dan SBR asli (1 lembar).
11. Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana.
12. Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *râhin* serta menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (*marhun bih*) sesuai jumlah yang tercantum dalam SBR.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya *marhun* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan. Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan

dihitung dari presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE). Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat dilunasi, *râhin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijârah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dilelang, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, maka Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Tabel 1
Jumlah Nasabah

Nama Nasabah	Jumlah Gadai	Tahun Kepemilikan
Sugiono	100 gram	2016-2018
Mudi Utomo	100 gram	Mei 2018
Ari Yuliawan	90 gram	2016-2018
Istika Rani	90 gram	2010-2018
Hanan Mauji Rohimi	200gram	2012-2018

Sumber: PT. Pegadaian Arif Rahmn Hakim Antasari

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu kepada Syariah Islam. Dimana semua jenis transaksi atau akad disini berdasarkan prinsip Islam, namun beda halnya dengan kewajiban membayar zakat oleh nasabah yang sudah memuhi nishab dan haul, yang bukan lagi menjadi tanggung jawab instansi pegadaian melainkan pribadi sendiri.⁸⁷

2. Sebab-sebab Nasabah Yang Belum Membayarkan Zakat Perhiasan Emas

Menurut Bapak Sugiono ia telah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim pada tahun 2010 dan beliau menggadaikan emas yang dimiikinya dimulai pada tahun 2016 sampai sekarang dengan jumlah 100gram dalam bentuk batangan. Alasan beliau melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah demi menunjang usaha yang dilakoninya. Dengan adanya pegadaian syariah dirasa sangat membantu para nasabah yang akan melakukan proses transaksi gadai dengan proses yang mudah dan pencairan dana yang cepat sehingga tidak perlu menjual barangnya. Lokasi yang sangat terjangkau juga menjadi alasan bapak Sugiono untuk melakukan transaksi di pegadaian Arif Rahman Hakim ini. Minimnya pengetahuan akan macam-macam zakat, membuat beliau belum pernah membayarkan zakat emas yang dimiliki dalam bentuk batangan/perhiasan dan yang telah mencapai nishab dan haul. Bapak Sugiono mengaku hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah yang dilakuan sebelum menjelang hari raya idhul fitri saja.⁸⁸ Pengetahuan akan nasabah lain yang membayarkan zakatnya juga tidak dijelaskan, karena beliau tidak

⁸⁷ *Ibid*, Revi Yuda Putra (pegawai pegadaian), wawancara, Bandar Lmpung, 2018.

mengenal satupun nasabah lainnya yang sama-sama sedang melakukan gadai di Arif Rahman Hakim.⁸⁹

Bagi bapak Mudi Utomo, selama ini dia tidak pernah membayarkan zakat emas yang dimilikinya, karena dia tidak mengetahui adanya pembayaran zakat atas emas yang telah mencapai nishab dan haulnya, dia hanya membayar kewajiban zakat fitrah saja. Beliau sendiri mengetahui Pegadaian Arif Rahman Hakim pada tahun 2010 pada saat kakak ipar nya yang bernama Asrizal pada tahun 2010 juga pernah menggadaikan emasnya, dan bapak Mudi Utomo mulai melakukan pegadaian pada tahun 2018 ini dengan jumlah emas 100gram dan dalam bentuk emas batangan. Beliau mengaku emas yang disimpan nya ini sudah mencapai satu tahun lebih dengan tujuan investasi, sewaktu-waktu dapat dicairkan dengan proses yang cepat. Alasan bapak Mudi Utomo menggadai di Pegadaian Syariah sendiri untuk mendapatkan proses berbasis syariah untuk keperluan peribadinya.⁹⁰

Bapak Ari Yuliawan warga sekitar Antasari juga mengungkapkan bahwa keberadaan Pegadaian Arif Rahman Hakim sangatlah membantunya dalam melakukan transaksi gadai, karena sebelumnya dia melakukan transaksi gadai di UPC Raden Intan sehigga merasa jarak yang sedikit cukup jauh. Beliau mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan zakat emas yang dimilikinya yang saat ini sedang di gadaikan dengan jumlah 90gram. Menurut beliau, sebenarnya ia telah mendengar ceramah akan kewajiban zakat emas yang telah mencapai nsihab 85gram namun sampai sekarang beliau belum

⁸⁹ Sugiono (nasabah), *wawancara*, Bandar Lampung, 29 Agustus 2018.

⁹⁰ Mudi Utomo (nasabah), *wawancara*, Bandar Lampung, 30 Agustus 2018.

pernah mengeluarkan zakatnya karena emas tersebut sedang dalam gadaian baru segenap satu tahun. Pengetahuan akan nasabah lain juga tidak diketahuinya apakah sudah ada atau belum yang membayarkan zakat di atas 85gram tersebut.⁹¹

Bapak Hanan Mauji Rohimi juga memiliki alasan yang sama dengan Bapak Ari Yuliawan, dimana beliau mengetahui adanya pembayaran zakat terhadap emas yang sudah mencapai nishab dan haulnya, namun ia masih belum membayarkan zakat karena emas tersebut masih dalam gadaian. Dia hanya membayarkan zakat fitrah dan zakat hasil usaha nya yang sedang dilakoninya saja. Beliau mengungkapkan bahwa telah menggadaikan emas miliknya dengan jumlah 200gram dalam bentuk emas batangan.⁹²

Menurut Ibu Istika Rani, telah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim sejak tahun 2008. Proses pelayanan di Pegadaian Syariah menurutnya lebih cepat dari pada Bank pada umumnya yang mempunyai persyaratan cukup rumit. Ibu istika Rani sendiri menggadaikan emasnya dengan jumlah 90 gram dimulai pada tahun 2010. Beliau menjelaskan, bahwa dia tidak pernah membayarkan zakat emas yang dimilikinya walau sudah mencapai nishab dan haulnya. Karena ia tidak begitu paham akan adanya kewajiban mambayarkan zakat emas tersebut.⁹³

⁹¹ Ari Yuliwan (nasabah), *wawancara*, Bandar Lampung, 31 Agustus 2018.

⁹² Hanan Mauji Rohimi (nasabah), *wawancara*, Bandar Lampung, 3 September 2018.

⁹³ Istika Rani (nasabah), *wawancara*, Bandar Lampung, 2 September 2018.

BAB IV

ANALISA DATA

ANALISIS HUKUM TERHADAP ZAKAT EMAS YANG DI GADAIKAN

Pada dasarnya Allah mewajibkan zakat ialah sebagai kewajiban bagi muslim untuk mendidik setiap muslim agar menjadi masyarakat yang baik, memiliki kecintaan terhadap hartanya untuk senantiasa mempertahankan di jalan Allah SWT dengan membantu sesama manusia, yang akan tercapai makna inti ibadah yang sempurna dimata Allah SWT. Prinsip dasar zakat ialah sejumlah harta (uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin, serta anggota masyarakat lain yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.

Sebagaimana ketentuan, nishab emas adalah 85 gram dengan lama kepemilikan satu tahun dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan emas. Adapun nishab perak adalah 595 gram dengan satu tahun atau lebih masa kepemilikannya sebagai haulnya dalam jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Dalam prakteknya yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai kewajiban zakat atas harta yang telah mencapai nishab-haulnya, dan sedang di gadaikan tersebut, tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai status hukumnya dalam analisis hukum Islam apakah wajib mengeluarkan emas yang di gadaikan.

Secara umum alasan nasabah Pegadaian Arif Rahman Hakim yang belum membayarkan zakat atas kepemilikan emas yang sedang di gadaikan adalah

1. Kurangnya pengetahuan akan kewajiban zakat pada harta yang sudah mencapai nishab dan haul.
2. Sebagian dari mereka hanya mengetahui adanya zakat fitra saja.
3. Ketidaktahuan status kewajiban zakat atas harta yang sedang di gadaikan.
4. Menurut mereka tidak perlu adanya pembayaran zakat karena pada masa itu emas sedang tidak dalam tanggungannya.

Menyikapi hal tersebut maka dapat dikaji dari syarat-syarat harta yang wajib dizakati, sumber al-qur'an dan hadits, dan pemikiran fuqaha:

4. Syarat Harta yang Wajib dikeluarkan zakat

- i. Harta tersebut didapatkan secara baik dan halal

Harta yang haram, baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

- j. Harta milik sempurna

Yang dimaksud dalam istilah ini adalah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan.

- k. Harta berkembang dan berpotensi dikembangkan

Disebut juga dengan istilah harta produktif (Al-Namaa') seperti melalui usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun pihak lain.

- l. Harta mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab maka kekayaan tersebut wajib untuk dizakatkan. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat yang lain.

m. Harta mencapai haul

Haul adalah perputaran masa satu tahun. Harta yang sudah cukup senishab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai satu tahun dimiliki secara sempurna. Syarat ini tidak mutlak karena, ada beberapa sumber zakat yang seperti zakat pertanian, dan rikaz tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun. Sabda Nabi Muhammad SAW:



Artinya: Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun.

5. Al-Qur'an dan hadits

Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat. Q. S At-Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ
 اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبْيَتَانِ
 يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزَمِيهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ
 أَنَا كَنْزُكَ

Artinya : “Barangsiapa dikaruniai harta oleh Allah, tapi tidak mau membayarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat, hartanya akan diwujudkan sebagai ular ganas yang memiliki dua taring bisa yang melihatnya dan menggigit kedua sisi mulutnya seraya berkata, 'Akulah hartamu akula barang simpananku.'”⁹⁴
 (H.R. Bukhari Muslim)

6. Pendapat Para Fuqaha

Dilihat dari macam-macam zakat, gadai termasuk dalam zakat piutang dimana terdapatnya perjanjian dengan barang jaminan yang nantinya akan ditukarkan dengan sejumlah uang dan pada saat yang ditentukan gadai tersebut dapat digugurkan dengan cara melunasi barang yang tadinya sebagai barang jaminan. Dimana kewajiban zakat piutang sendiri, adalah orang yang mempunyai hutang yang mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat, jika telah haul, sebagaimana halnya harta lain yang ada pada tangannya. Dan apabila harta itu tidak ada ditangan, maka masih diwajibkan mengeluarkan zakatnya, sebagaimana halnya harta perdagangan yang tidak ada ditempat dan barang titipan.

Menurut Ibnu Hazm mengatakan, pinjaman tidaklah wajib zakat. Pengertiannya adalah keduanya tidak wajib zakat baik pemberi ataupun

⁹⁴ Zainuddin Hamidy, et. Al. *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992). h.104.

yang meminjam. Dengan alasan, dari pihak peminjam kepemilikan kekayaan tidaklah miliknya penuh, tetapi hanyalah pemakai dan pengambil manfaat. Dari pihak yang meminjamkan, kekayaan itu tidaklah secara nyata berada ditangannya tetapi digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, yang demikian berarti pemilikannya tidak penuh.

Sayyid Sabiq sendiri mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang telah wajib dizakati, sedangkan ia memiliki utang yang harus dibayar, maka ia harus membayar utang nya dengan harta tersebut dan membayar zakat jika sisanya mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, ia tidak wajib zakat membayar zakat karena dalam keadaan itu ia termasuk orang yang fakir. Wajib zakat pada harta tersebut karena, gadai tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Menurut Imam Maliki, tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas orang yang menggadai, karena barang tidak ada ditangannya sebagai kepemilikan yang penuh. Imam Hambali mengatakan, bahwa hutang dapat menggugurkan kewajiban zakat secara mutlak. Pendapat ini sejalan juga dengan pemikiran Abu Hanifah, diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, Makhul, dan at-Tsauri.

Imam Syafi’i mengatakan, hutang tidak menghalangi kewajiban zakat karena, zakat tergantung dengan barang itu, hutang tergantung dengan tanggungan. Orang yang berhutang wajib membayar zakat harta yang dipinjam oleh orang lain, jika berlalu satu tahun, sementara harta itu

dalam kepemilikannya. Sebab, dengan menghutang dia telah memiliki harta itu dengan kepemilikan yang sempurna.

Imam Maliki mengatakan, kepemilikan penuh adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Imam Syafi'i mengatakan, yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Imam Hambali mengatakan, harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan dengan bebas.

Disimpulkan kepemilikan harta yang digadaikan harus berstatus milik penuh, sebagaimana dinyatakan oleh ahli fiqih, bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut dalam hak orang lain, dapat dipergunakan faedahnya dapat dinikmatinya. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud milik penuh adalah kepemilikan itu asli dan dimiliki.

Setelah memperhatikan berbagai pendapat mereka mengatakan bahwasannya harta yang sedang di gadaikan tidaklah ada kewajiban membayar zakat karena pada saat harta di gadaikan status harta tidak berada dalam kepemilikan yang penuh melainkan sedang dalam tanggungan. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat atas emas yang sedang di gadaikan tidak menimbulkan kewajiban seseorang untuk membayarkan zakatnya. Karena syarat wajib zakat sendiri ialah milik penuh, dimana saat barang yang sedang di gadaikan itu bukan lagi milik penuh. Namun kewajiban zakat atas barang gadaian tetap harus dibayarkan, ketika barang gadaian tersebut telah diambil kembali atau ditebus dan pada saat itu telah menjadi kewajiban kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang penulis dapat mengenai Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas Yang di Gadaikan Study Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

Dalam Hukum Islam telah jelas bahwa adanya kewajiban membayar zakat dari macam-macam zakat itu sendiri. Zakat terhadap barang gadaian sendiri, termasuk dalam zakat piutang yang tetap adanya kewajiban zakat setelah barang yang di gadaikan tersebut berada ditangan kembali. Tidak ada kewajiban zakat atas emas yang sedang di gadaikan karena kepemilikan emas tersebut tidak dalam kepemilikan penuh, dan jika akan membayar zakat nya peminjam atau nasabah dapat menunggu hingga barang gadai tersebut sudah dalam kembali menjadi hak milik.

B. Saran

Adapun yang dapat disarankan bagi pihak masyarakat khususnya nasabah Pegadaian Arif Rahman Hakim, yaitu:

1. Bagi Nasabah, hendaklah membayarkan zakat atas harta yang dimilikinya yang sudah mencapai nishab dan haulnya.

2. Zakat barang yang sedang di gadaikan setelah menebus atas mengambil kembali barangnya hendaklah secepatnya membayarkan zakatnya. Dengan melihat harta yang sedang di gadaikan tersebut termasuk atau tidak harta wajib zakat.
3. Bagi Pihak Pegadaian UPC Arif Rahman Hakim hendaklah memberikan pengetahuan kepada nasabah yang menggadaikan harta nya yang mencapai nishab dan haul untuk memperhatikan dan membayarkan zakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Karabah, *Al Din Wa Al-Zakat 'ala Mazhib Al Ar Ba'ah*.
- Abdul Hamid Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010.
- Agus Thayib Afifi dan Shabrina Ika, *Kekuatan Zakat*, Yogyakarta, Al bana, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad bin Yahya Al-Faifi , *Ringkasan Fikih Sunna*, Jakarta, Beirut Publishing, 2016.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Cilandak Barat, PT.Mizan Publika, 2008.
- Alimuddin Ali, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian FakirMiskin*, IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, 1990.
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Departemen Agama RI, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002.
- Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Bandung, Tim Tafakur, 2011.
- Hasby Ash-Shidieqy , *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Riski Putra, 1997.
- Kartini Kartono , *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.
- Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta, Ladang Karya, 2017.
- Labil Mz, *Fiqh Islam*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2006.

- Lexy J Meoleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Jeddah, Intermasa, 2013.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Cetakan V*, Bandung, Mizan, 2002.
- Muhammad bin Abdurahman Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, Jakarta, Istanbul, 2015.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad Daud Al-Baqi, Abd, *Al-Lu' wa Al-Marjan, Juz II*, terjemah oleh Muslih Shabir, Semarang, Al-Ridha, 1993.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1998.
- M.Maman Suharman Pamungkas, M.Iman, *Fiqih 4 Mazhab*, Jakarta, Al-Makmur, 2015.
- M.Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid I*, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2005.
- Said Hawwa, *Al Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1972.
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'Araf, 1978.
- Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1986.
- Sunan Abu Dawud, *az-Zakah, Bab fi zakati as-Saimah*, Jilid II, hadits nomor 1573.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2012.
- Undang-undang no. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wahabah Az-Zuhayly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung, Tim Tafakur, 2011.

Yayat Hidayat, *Zakat Profesi*, Bandung, Mulia Press, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Nusa, 2007.

Zainuddin Hamidy, et. Al. *Shahih Bukhari*, Jakarta, Widjaya, 1992.

